

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Konseptual

Pada bagian ini akan diuraikan landasan teoritis yang mendasari penelitian ini. Teori-teori yang relevan akan digunakan untuk menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Perkapita, dan Pengangguran.

2.1.1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana individu dan rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Todaro (2003), kemiskinan tidak hanya mencakup kurangnya pendapatan, tetapi juga mempengaruhi akses terbatas ke layanan publik dan peluang untuk hidup yang layak. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kemiskinan merupakan suatu keadaan ketika individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan esensial demi menjaga dan meningkatkan kualitas hidup yang layak. Kebutuhan esensial ini mencakup aspek pangan, layanan kesehatan, akses pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, hunian yang layak, ketersediaan air bersih, kepemilikan tanah dan akses terhadap sumber daya alam serta lingkungan yang sehat. Selain itu, hak dasar juga meliputi jaminan keamanan dari tindakan kekerasan atau ancamannya, serta hak untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan politik.

Kemiskinan mutlak adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu atau hampir tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan

papan (Todaro & Smith (2020: 228). (Kaplinsky,2005) juga menjelaskan bahwa kemiskinan mutlak merupakan standar hidup minimum yang mencerminkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar seseorang dapat bertahan hidup. Menurut Todaro & Smith (2020: 228), kemiskinan relatif merupakan kondisi di mana masyarakat memiliki penghasilan yang rendah sehingga kehidupan mereka kurang mendapatkan jaminan yang memadai. (Kaplinsky,2005) menjelaskan bahwa kemiskinan relatif dapat dipahami sebagai ketimpangan antara pendapatan orang miskin dengan orang kaya.

Kemiskinan biasanya terjadi karena kondisi alamiah dan buatan. Yulianto (2023) dalam laman djp.b.kemkeu.go.id menyebut penyebab karena kondisi alamiah, antara lain sumber daya alam yang terbatas dan bencana alam. Penyebab kemiskinan juga beragam. Menurut Sutyaastie Remi dan P. Tjiptoherijanto tahun 2002 Penyebab kemiskinan adalah pendapatan yang rendah, sedangkan Sumodiningrat dalam bukunya Membangun perekonomian rakyat tahun 1998 membedakan penyebab kemiskinan menjadi tiga yaitu:

- 1). Kemiskinan natural merupakan keadaan miskin, karena dari asalnya memang miskin.
- 2). Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya, dimana mereka sudah merasa kecukupan dan tidak merasa kekurangan.
- 3). Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan hasil pembangunan yang belum seimbang.

2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja dari total penduduk usia kerja, yang memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang terlibat dalam pasar tenaga kerja (BPS). TPAK menggambarkan presentase penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam ekonomi pada suatu wilayah (BPS). Dengan tingginya TPAK maka semakin banyak pula presentase angkata kerja yang bekerja dari seluruh angkatan kerja sehingga kesejahteraannya meningkat (Faelassuffa dan Yuliani, 2021). Bertambahnya angkatan kerja tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja akan mengakibatkan peningkatan pengangguran yang berimbas pada penurunan TPAK terus menurun. Di samping itu perlu diingat bahwa angkatan kerja yang memiliki keahlian akan dibutuhkan oleh tempat bekerja yang sesuai bidang keahliannya (Irvanto et al. 2017). Dengan begitu maka TPAK akan meningkat karena lapangan pekerjaan yang tersedia dapat dimasuki oleh angkatan kerja yang memiliki keahlian di bidang yang sesuai.

Secara teori, peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja dapat menurunkan kemiskinan karena semakin banyak individu yang bekerja atau berusaha bekerja sehingga pendapatan rumah tangga meningkat. Namun, beberapa penelitian menemukan hasil berbeda, ada yang menunjukkan hubungan negatif signifikan (peningkatan partisipasi menurunkan kemiskinan), sementara yang lain ada indikasi hubungan positif (peningkatan partisipasi tidak langsung menurunkan kemiskinan jika kualitas pekerjaan rendah) tergantung konteks daerah dan kondisi ekonomi (Tia Handani & Joko Suharianto, 2025).

2.3 PDRB Perkapita

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Hadi Sasana, 2001), Sedangkan PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001). Menurut Badan Pusat Statistik (2008) angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran yang disajikan sebagai berikut:

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah provinsi dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu: Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi

ini PDRB mencakup juga penyusutan neto. Jumlah semua komponen pendapatan persektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- b. Konsumsi pemerintah.
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d. Perubahan stok ekspor netto.

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, sering digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai indikator. Mahendra (2017) menyatakan bahwa PDRB per kapita merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang lebih akurat karena mampu mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu daerah dengan lebih baik dibandingkan hanya melihat nilai PDRB secara keseluruhan. Dengan demikian, PDRB per kapita dapat menggambarkan kondisi pembangunan ekonomi suatu wilayah sekaligus mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata per penduduk di suatu daerah. Teorinya, peningkatan PDRB per kapita menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan menurun. Secara umum, penelitian empiris menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan PDRB per kapita

terhadap kemiskinan; setiap peningkatan PDRB per kapita diasosiasikan dengan penurunan jumlah penduduk miskin (Hayatun Nufus, 2023).

2.4 Pengangguran

Menurut BPS, istilah "pengangguran" merujuk pada individu yang tidak memiliki pekerjaan, sedang aktif mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, atau sedang dalam proses mencari pekerjaan. Berdasarkan standar internasional, seseorang dianggap pengangguran jika ia secara aktif mencari pekerjaan dengan harapan memperoleh penghasilan tertentu, namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Selain itu, menurut Kuncoro, kelompok yang termasuk pengangguran juga meliputi mereka yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan diri untuk bekerja, atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sulit memperoleh pekerjaan sebelumnya (Sayifullah & Gandasari Tia Ratu, 2016). Ketidaktepatan pasar tenaga kerja atau ketidakmampuannya dalam menyerap seluruh angkatan kerja yang ada dapat menimbulkan pengangguran. Hal ini terjadi karena jumlah tenaga kerja yang tersedia melebihi permintaan akan pekerjaan yang ada. Menurut Todaro (2000), faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah perluasan angkatan kerja dan populasi. Pertumbuhan populasi yang besar akan memperluas pasar domestik, sementara peningkatan angkatan kerja menambah jumlah tenaga kerja produktif.

Sadono Sukirno (2004) mengklasifikasikan pengangguran menjadi tiga jenis berdasarkan penyebabnya:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara kesempatan kerja dan pencari kerja, misalnya karena kurangnya informasi.

2. Pengangguran struktural, yang disebabkan oleh perubahan dan penyesuaian dalam struktur ekonomi.

3. Pengangguran konjungtural, yaitu pengangguran yang muncul akibat fluktuasi ekonomi dan peningkatan pengangguran alami.

Sebagian besar pengangguran di negara berkembang seperti Indonesia disebabkan oleh upah yang rendah dan pertumbuhan sektor informal. Di Indonesia, tingkat pengangguran cenderung rendah karena banyak penduduk miskin yang bersedia bekerja dengan upah berapapun demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga hal ini menjadi faktor utama rendahnya angka pengangguran di negara tersebut.

Secara teori ekonomi, pengangguran merupakan salah satu faktor penyebab utama kemiskinan karena individu yang menganggur tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Oleh karena itu, meningkatnya pengangguran akan meningkatkan risiko dan tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

Berdasarkan berbagai penelitian empiris, termasuk penelitian di wilayah Indonesia seperti yang dilakukan oleh (Rivana & Gani 2024) serta (Mayani & Riani 2023), pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, setiap kenaikan pengangguran akan diikuti oleh kenaikan tingkat kemiskinan. Hubungan ini dijelaskan oleh fakta bahwa ketika lebih banyak penduduk menganggur, kemampuan mereka untuk memperoleh pendapatan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga menurun, sehingga jumlah penduduk miskin meningkat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Prakoso, *et.al.* (2019) adalah penelitian menganalisis pengaruh investasi, pendidikan, kesehatan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2010 sampai 2019. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang diambil dari data enam Provinsi di Pulau Jawa dan data time series tahun 2010 sampai 2019. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa investasi dan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2010 sampai 2019. Sedangkan, kesehatan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2010 sampai 2019. Secara simultan, Investasi, Pendidikan, Kesehatan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2010 sampai 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Suprapti, *et.al.* (2024) adalah Penelitian menganalisis Pengaruh PDRB Per Kapita, IPM dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (2020-2022). Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan menggunakan *software Eviews 10.0*. Dari hasil regresi menunjukkan PDRB per Kapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan, PDRB per Kapita (X1), IPM (X2) dan Tingkat Pengangguran (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Safuridar, *et.al.* (2024) adalah penelitian menganalisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis regresi linier berganda. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa secara parsial tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh, sedangkan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Secara simultan tingkat partisipasi angkatan kerja dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Penelitian ini dilakukan oleh Naukoko, *et.al.* (2023) adalah penelitian menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PDRB perkapita dan belanja bantuan sosial terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan bantuan SPSS 26. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan uji parsial yang diperoleh menunjukkan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel. PDRB Perkapita berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel. Belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel.

Hisballah (2021) menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Provinsi Aceh di Kabupaten/Kota. Penelitian ini

menggunakan metode Kuantitatif Asosiatif dengan alat analisis regresi linier sederhana. Dari hasil regresi tingkat pengangguran terbuka tidak menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

